

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN INTENSITAS
PERSEDIAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2011-2013)**

Oleh :

Diana Lestari

Pembimbing : R. Adri Satriawan Surya dan Supriono

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : dianalestari612@yahoo.com

The Influence of corporate governance and inventory intensity to tax management

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Corporate Governance and inventory intensity to tax management. Corporate governance consisting of number board of commissioner, percentage Independent Commissioner, Audit Committee, and compensation of commissioner and executive. This study is manufacture company for years 2011-2013 selected by using method of purposive sampling. There are 147 companies fulfilling criteria. This study used Multiple regression analysis was conducted using SPSS version 17.00 for windows. The result of this study that the variables that affect the tax management is number board of commissioner, independent commissioner, audit committee, and compensation of commissioner and executive. While variable that did not affect the tax management is inventory intensity.

Keywords: tax management, corporate governance, and inventory intensity

PENDAHULUAN

Pajak menduduki posisi penyumbang terbesar bagi kas negara, karena besarnya peran penerimaan pajak bagi kas negara memungkinkan segala kegiatan pemerintahan dapat berjalan terus. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai aspek kehidupan bangsa. Manajemen pajak merupakan upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif (Pohan 2013:5). Diperlukannya manajemen pajak sebenarnya berangkat dari hal

yang sangat mendasar dari sifat manusia, dimana jika ada beban pajak yang harus dibayar maka sebisa mungkin wajib pajak tersebut melakukan berbagai upaya agar beban pajak tersebut sekecil mungkin untuk dibayar.

Kasus yang ditemui oleh DJP dimana di Indonesia sendiri peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Dari laporan BEI, sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di Belanda dari 3,5 persen meningkat ke 5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015,

consumer goods tersebut stagnan di angka RP.27 trilyun dengan kenaikan royalty dari 3,5 persen menjadi 8 persen berarti ada kenaikan sebesar 4,5 persen dikalikan RP.27 trilyun atau sekitar RP. 1,215 trilyun. Maka potensial kehilangan PPh badan tahun 2015 adalah Rp1,215 trilyun dikalikan 25 persen atau sebesar RP.300 milyar (www.pajak.go.id).

Untuk dapat melakukan manajemen pajak maka pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan menjadi perhatian khusus untuk bisa mengelola atau mengatur agar beban pajak yang seharusnya dibayar bisa lebih kecil dari total yang seharusnya di bayar. Disini *corporate governance* merupakan hal yang menjadi fokus utama untuk dapat melakukan dan mengelola perusahaan dengan baik. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak menurut Bernad (Meilinda dan Cahyonowati 2013). Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, komite audit dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi.

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri (Sutedi 2011:143).

Kedudukan komisaris independen yang dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik adalah berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan dari dewan komisaris. (Sutedi 2011:153). Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab emiten terhadap pemegang saham.

Komite audit merupakan bagian dari komponen *corporate governance* yang juga sangat diharapkan dapat mendukung dilakukannya kinerja dan pengawasan yang baik bagi perusahaan. Kompensasi merupakan insentif atau imbalan yang diberikan perusahaan kepada pengelola perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan pengelola perusahaan tersebut seperti berupa gaji, tunjangan dan lainnya. Adapun kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan (Bernad dalam Meilinda dan Cahyonowati 2013). Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaan pada persediaan (Darmadi 2013).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Meilinda dan Darmadi. Pada penelitian ini akan menguji pengaruh *corporate governance* (jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, komite audit, jumlah kompensasi) dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak?
- (2) Apakah persentase

komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak? (3)Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak? (4)Apakah jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak (5)Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: (1)Untuk menguji pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak. (2)Untuk menguji pengaruh persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak. (3)Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak. (4)Untuk menguji pengaruh jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap manajemen pajak. (5)Untuk menguji pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Adanya tujuan yang berbeda antara pihak principal dan agen dapat digambarkan dalam suatu pihak dimana pemegang saham sebagai prinsipal dan pengelola perusahaan sebagai agen. *Agency theory* juga berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda termasuk dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengelola suatu perusahaan.keagenan ini dapat menjadi perhatian penting untuk memahami pengelolaan perusahaan yang baik yaitu dengan menerapkan *corporate governance*.

Manajemen Pajak

Menurut Zain dalam bukunya *Manajemen Perpajakan* (2005:5) manajemen pajak adalah merupakan suatu proses mengorganisasikan usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Djaiz dikutip oleh Agustinus (Pohan 2013:17) mengartikan manajemen pajak yaitu : “*tax management* berarti melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan perpajakan yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Corporate Governance

Menurut Sutedi (2013:7) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jumlah Dewan Komisaris

Berdasarkan UUPT pasal 1 angka 6 UUPT, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan

komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, tugas pengawasan dan nasihat itu dilaksanakan oleh dewan komisaris berdasarkan anggaran dasar perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan dewan komisaris harus bertujuan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Persentase Komisaris Independen

Komisaris independen yang diatur dalam UUPT No 40 tahun 2007 adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang sahamnya, komisaris independen tidak boleh gegabah memberikan persetujuannya terhadap transaksi-transaksi atau kegiatan emiten yang secara materiil mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan (Sutedi 2011:150).

Komite Audit

Komite audit yang diatur dalam BAPEPAM-LK Nomor IX.1.5 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat profesional guna meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Pelaksanaan tugas oleh komite audit diharapkan dapat dilakukan secara efektif sehingga memungkinkan pengendalian perusahaan dapat berjalan dengan

baik serta dapat mendukung *good corporate governance* yang baik

Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kompensasi menurut beberapa pihak salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1997) bahwa kompensasi adalah suatu jasa yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajemennya. Perencanaan kompensasi diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja yang baik khususnya untuk meningkatkan strategi baru dalam pencapaian tujuan, dalam hal ini dengan adanya kompensasi kepada dewan komisaris maka diharapkan perusahaan dapat lebih melakukan investasi lebih dalam bidang manajemen pajak. Kompensasi dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, atau tambahan penghasilan.

Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan adalah bagian dari *capital intensity* ratio yang merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk persediaan (Ardyansah:2014). Dalam SAK-ETAP yang diatur oleh IAI, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; dalam proses produksi untuk kemudahan dijual; atau dalam bentuk bahan perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Zimmerman dalam Richardson dan Lanis (2007), menyatakan bahwa *political power theory* dan *political cost theory* dapat menjelaskan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dimana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa ada ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari size, *leverage*, intensitas aset dan intensitas persediaan dapat

menjelaskan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan, dimana perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*).

Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak

Sebagai wujud untuk mencapai strategi perusahaan dengan menerapkan *corporate governance* maka disini peran dewan komisaris menjadi bagian penting dalam pelaksanaan *corporate governance* tersebut. Dewan komisaris dengan jumlah yang sedikit akan lebih fokus pada strategi untuk melakukan manajemen pajak. kinerja yang baik yang diharapkan dalam perusahaan tentu akan berdampak pada manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang artinya diharapkan akan ada pengelolaan beban pajak yang efektif sehingga akan menghasilkan laba yang tinggi.

H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Persentase Komisaris Independen

Kemampuan dan pemahaman komisaris independen terhadap bidang emiten akan sangat mempengaruhi persetujuan dan keputusan yang dibuat, sesuai dengan tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang sahamnya, komisaris independen tidak boleh gegabah memberikan persetujuannya terhadap transaksi-transaksi atau kegiatan emiten yang secara materiil mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan (Sutedi 2011:150).

Secara langsung keberadaan komisaris independen menjadi penting karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Dengan adanya komisaris independen maka semua pihak yang berkepentingan akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dimana akan terbentuk situasi yang suitable dengan prinsip dasar *corporate governance* dan meningkatkan kemampuan sehingga kinerja mereka efektif dan tentu mendukung untuk dapat mengelola pajak yaitu dengan manajemen pajak.

H2 : Persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak

Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak

Keberadaan komite audit tentu tidak terlepas dari penerapan *corporate governance* yang baik didalam perusahaan yang tentunya untuk meningkatkan kinerja yang baik. Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat professional guna meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan hal tersebut tentu juga diharapkan dalam melakukan manajemen pajak yang efektif bagi perusahaan.

H3 : Komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari diberikannya kompensasi yaitu untuk meningkatkan kinerja yang baik dari pihak-pihak pengelola perusahaan

untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dan mengharapkan adanya kontribusi positif dari kinerja yang baik tersebut yaitu dalam mengelola pajak perusahaan, dimana dalam mengelola pajak tersebut principal sangat mengharapkan adanya manajemen pajak yang dilakukan dengan baik sehingga dapat menekan beban pajak serendah mungkin dan hal tersebut akan berdampak pada laba setelah pajak yang diperoleh oleh perusahaan. Dengan adanya penjelasan tersebut maka untuk dapat mencapai kinerja yang baik dan adanya timbal balik maka pemberian kompensasi merupakan cara yang tepat untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut yang mana dengan adanya kinerja yang baik dari pemberian kompensasi maka dalam halnya melakukan manajemen pajak tentu sangat diharapkan terlaksana dengan efektif.

H4 : Jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak

Dalam penelitian Richardson dan Lanis perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Jika sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat melakukan manajemen pajak maka dalam hal ini perusahaan akan mencari cara untuk dapat mengefisiensikan beban pajak seperti memanfaatkan PSAK No 14 mengenai biaya yang ditimbulkan dari total persediaan yang meningkat dan diakui sebagai beban serta mengurangi laba. Sehingga diharapkan pajak yang dikenakan terhadap perusahaan akan rendah

dengan begitu perusahaan dapat dikatakan melakukan manajemen pajak. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak, karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – *political cost theory* (Watts dan Zimmerman, dalam Richardson 2007), ini berarti pemerintah akan berupaya untuk dapat menarik pajak bagi setiap perusahaan, akan tetapi diharapkan perusahaan tidak melakukan manajemen pajak karena dapat mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor pajak.

H5 : Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2012 sampai 2014. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria pertimbangan dan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah: (1)Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 2014. (2)Perusahaan manufaktur yang terdaftar tersebut tidak delisting selama periode pengamatan. (3)Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan per 31 desember untuk periode 2011, 2012 dan 2013 dan pelaporan menggunakan mata uang rupiah. (4)Perusahaan mempunyai data yang lebih lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris,

komisaris independen, komite audit, kompensasi dewan komisaris dan direksi dan intensitas persediaan. (5) Perusahaan memiliki laba setelah pajak bernilai positif untuk tahun pengamatan dan nilai CETR 0-1, didapat 49 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel, dengan 147 pengamatan selama tahun 2011-2013.

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD), annual report, dan mengakses website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Model analisa data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut.

$$CETR = \alpha_0 + \beta_1 BOARD + \beta_2 INDEP + \beta_3 AUD + \beta_4 COMP + \beta_5 INPERS + \epsilon_t$$

Keterangan :

CETR	: Cash Tax Paid
BOARD	: Jumlah Dewan Komisaris
INDEP	: Persentase Komisaris Independen
AUD	: Komite Audit
COMP	: Jumlah Kompensasi dewan Komisaris dan direksi
INPERS	: Intensitas Persediaan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	: Koefisien Variabel Independen
α_0	: Konstanta
ϵ	: Error

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Manajemen Pajak

Sophar Lumbantoruan (Pohan 2013:17) mengemukakan secara umum manajemen pajak adalah strategi untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perhitungan manajemen pajak menggunakan CETR mengacu pada penelitian (Chen et al. 2010) yang mana diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer.

$$CETR = \frac{\text{cash tax paid}}{\text{pretax income}}$$

Jumlah Dewan Komisaris

Dengan adanya dewan komisaris tentu sangat diharapkan dapat dilakukan perencanaan dan strategi-strategi secara khusus untuk mengelola beban pajak yaitu dengan melakukan manajemen pajak. Data dalam perhitungan ini diperoleh dari pengungkapan catatan atas laporan keuangan.

$BOARD = \sum$ seluruh anggota yang tergabung dalam dewan komisaris

Persentase Komisaris Independen

Dengan adanya komisaris independen maka semua pihak yang berkepentingan akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dimana akan terbentuk situasi yang suitable dengan prinsip dasar *corporate governance* dan meningkatkan kemampuan sehingga kinerja mereka efektif dan tentu mendukung untuk dapat mengelola pajak yaitu dengan manajemen pajak. Data dalam perhitungan ini didapat dalam pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan rumus berikut :

$$INDEP = \frac{\text{jumlah seluruh komiaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Komite Audit

Komite audit menurut BAPEPAM-LK Nomor IX.1.5 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat profesional guna meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan.

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{seluruh komite audit}$$

Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dengan adanya pemberian kompensasi tersebut maka diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan juga kepada pengelola aset. Kepatuhan dapat dipandang bagaimana perilaku individu atau masyarakat dalam menyikapi fenomena dan situasi manakala fenomena yang diamati memberikan keuntungan dalam hidupnya, maka hal tersebut akan membawa sikap yang positif dalam hal kepatuhannya, demikian juga dengan dewan komisaris dan direksi yang mana mereka bertindak sebagai eksekutif yang juga akan melakukan hal yang sama yaitu melakukan kebijakan manajemen pajak

$$\text{COMP} = \text{Ln total kompensasi}$$

Intensitas Persediaan

Jika sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat melakukan manajemen pajak maka dalam hal ini perusahaan akan mencari cara untuk dapat mengefisiensikan beban pajak seperti memanfaatkan PSAK No 14 mengenai biaya yang ditimbulkan dari total persediaan yang meningkat dan diakui menjadi beban serta

mengurangi laba, sehingga diharapkan pajak yang dikenakan terhadap perusahaan akan rendah dengan begitu perencanaan pajak atau manajemen pajak yang dilakukan perusahaan juga meningkat.

Intensitas persediaan adalah bagian dari capital intensity ratio yang merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk persediaan (Ardyansah:2014).

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{total persediaan}}{\text{total aset}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen pajak, sedangkan variabel independennya yaitu *corporate governance* yang meliputi (jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, komite audit, kompensasi dewan komisaris dan direksi) dan intensitas persediaan. Perusahaan yang menjadi objek penelitian ialah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangannya dengan periode pengamatan tiga tahun. Berdasarkan metode pengambilan sampel dengan *purposive sampling* didapat sebanyak 49 sampel perusahaan.

Analisa Data dan Pengujian Hipotesis

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel penelitian.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	147	.03	.78	.2908	.14420
BOARD	147	2.00	12.00	4.4218	1.87969
INDEP	147	.14	.67	.3485	.09914
AUD	147	2.00	4.00	3.0816	.47557
COMP	147	8.93	11.99	10.0245	.66519
INPERS	147	.02	.75	.2211	.12652
Valid N (listwise)	147				

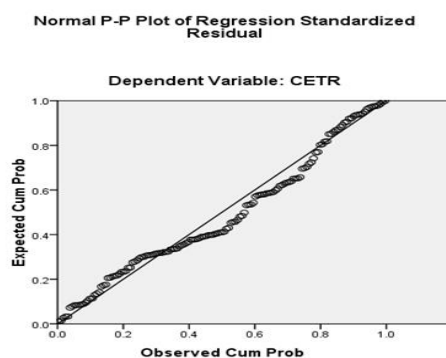
Data olahan, 2015

Tabel 1 menunjukkan deskriptif variabel penelitian dengan jumlah data setiap variabel yang valid sebanyak 147. Pada tabel 1 dapat dijelaskan manajemen pajak yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* atau CETR mempunyai nilai minimum 0,03 dan nilai maksimum 0,78. Mean cash effective tax rate adalah 0,2908 dengan standar deviasi 0,14420. Dewan komisaris atau BOARD mempunyai nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 12,00. Mean dewan komisaris adalah 4,4218 dengan standar deviasi 1,87969. Komisaris independen atau INDEP mempunyai nilai minimum 0,14 dan maksimum 0,67 sementara mean komisaris independen adalah 0,3485 dengan standar deviasi 0,09914. Komite audit atau AUD mempunyai nilai minimum 2,00 dan nilai maksimum 4,00 sementara mean komite audit adalah 3,0816 dengan standar deviasi 0,47557. Kompensasi atau COMP mempunyai nilai minimum 8,93 dan nilai maksimum 11,99 sementara mean kompensasi adalah 10,0245 dengan standar deviasi 0,66519. Intensitas persediaan atau INPERS mempunyai nilai minimum 0,02 dan nilai maksimum 0,75 sementara mean intensitas persediaan adalah 0,2211 dengan standar deviasi 0,12652.

Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data mempunyai distribusi atau sebaran yang normal atau tidak.

Gambar 1
Grafik normal P-P plot



Tabel 2
Hasil Uji One sample kolmogorov smirnov

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	N	147
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11506431
	Absolute	.099
	Most Extreme Positive	.099
	Negative	-.052
	Kolmogorov-Smirnov Z	1.195
Asymp. Sig. (2-tailed)		.115

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data olahan, 2015

Pada tabel 2 hasil penelitian pengujian dengan menggunakan Uji Komogorov-Smirnov memiliki signifikansi diatas 0,05 yaitu 0,115. Hal ini menunjukkan sudah diperolehnya distribusi normal atau nilai residual secara normal

Hasil Pengujian Asumsi Klasik Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas

(independen). Model regresi yang baik tentu terbebas dari multikolonieritas.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	BOARD	.514	1.944
	INDEP	.859	1.164
	AUD	.687	1.456
	COMP	.619	1.615
	INPERS	.970	1.031

a. Dependent Variable: CETR

Data olahan, 2015

Pada tabel3 diperoleh bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel independen < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,1$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mengalami gangguan multikolonieritas .

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah sebuah regresi linear ada korelasi diantara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik tentu terbebas dari autokorelasi.

Hasil uji autokorelasi. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Du	DW	4 – Du	Keterangan
1,801	1,888	2,199	Bebas autokorelasi

Data olahan, 2015

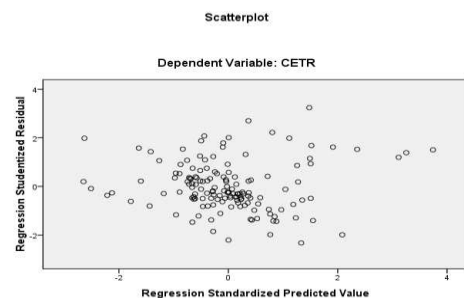
Dengan demikian diperoleh bahwa nilai DW berada diantara du yaitu 1,801 dan 4-du yaitu 2,199. Dengan demikian menunjukkan

bahwa model regresi tersebut sudah bebas dari masalah autokorelasi

Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Gambar 2
Hasil Uji Heterokedasitas



Tabel 5
Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error		t	Sig.
1	(Constant)	-.014	.114		
	BOARD	-.006	.004	-.155	1.406
	INDEP	.087	.061	.121	1.412
	AUD	-.022	.014	-.146	1.532
	COMP	.018	.011	.173	1.714
	INPERS	-.082	.045	-.145	1.808

Data olahan,2015

Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 2 menunjukkan bahwa grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar diatas dan dibawah nol pada sumbu Y. Sehingga dapat diartikan bahwa model regresi tersebut bebas dari heterokedastisitas. Dan berdasarkan uji glejser pada tabel 5 diperoleh nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual $> 0,05$. Dapat diartikan

bahwa model regresi bebas dari heterokedastisitas

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Atas dasar hasil analisis regresi dengan menggunakan sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = -0,413 - 0,019 \text{ BOARD} + 0,378 \text{ INDEP} - 0,065 \text{ AUD} + 0,087 \text{ COMP} - 0,086 \text{ INPERS} + e$$

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.603 ^a	.363	.341	.11709

a. Predictors: (Constant), INPERS, INDEP, BOARD, AUD, COMP

b. Dependent Variable: CETR

Data olahan, 2015

Dari tabel 6 diatas diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,341. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, komite audit, jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi serta intensitas persediaan terhadap manajemen pajak adalah sebesar 34,1%. sedangkan sisanya 65,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Uji t Parsial

Tabel 7

Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	-.413	.196		-2.109
	BOARD	-.019	.007	-.247	-2.634
	INDEP	.378	.105	.260	3.585
	AUD	-.065	.025	-.215	-2.655
	COMP	.087	.019	.403	4.720
	INPERS	-.086	.078	-.075	-1.106

a. Dependent Variable: CETR

Data olahan, 2015

Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Manajemen pajak

Hasil yang diperoleh dari regresi menunjukkan bahwa t hitung dengan nilai -2,634 dan probabilitas signifikansi $0,009 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris mempengaruhi manajemen pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik yaitu adanya dewan komisaris tentu akan menciptakan kinerja yang baik bagi perusahaan, yang mana akan dapat dilihat dalam perumusan strategi untuk menentukan manajemen pajak yang baik dan efektif bagi perusahaan. Adanya hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan keefektifan fungsi pengawasan sejalan dengan penelitian Minnick dan Noga (2010). Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Meilinda 2012 yang menunjukkan jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak

Hasil dari regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,585 dengan probabilitas signifikansi adalah 0,000 berada lebih rendah daripada $\alpha = 0,05$.

Dapat disimpulkan bahwa komisaris independen mempengaruhi manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan komisaris independen dalam membantu dewan komisaris memiliki peranan penting dalam merumuskan manajemen pajak perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Sabli dan Noor (2012) menyebutkan bahwa komisaris independen melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan, pengawasan yang dilakukan untuk dapat menjadi penengah antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham sehingga tidak terjadi asimetri informasi. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate* yang merupakan bagian dari perencanaan pajak dan Meilinda 2012 bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap CETR.

Pengaruh Komite Audit terhadap manajemen pajak

Hasil dari regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar -2,655 dengan probabilitas signifikansi adalah 0,009 berada lebih rendah daripada $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa komite audit mempengaruhi manajemen pajak. Ini menunjukkan bahwa komite audit merupakan komponen *corporate governance* yang juga ikut berperan penting dalam melaksanakan kinerja yang baik bagi perusahaan sehingga hal tersebut dapat terlihat dalam perumusan pajak. Penelitian Dewi (2014) yang juga menunjukkan bahwa perusahaan yang

memiliki komite audit seperti yang telah ditetapkan oleh BEI akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung didalam perusahaan.

Pengaruh jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap manajemen pajak

Hasil dari regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,720 dengan probabilitas signifikansi adalah 0,000 berada lebih rendah daripada $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak. Dengan *corporate governance* yang baik akan memberikan kompensasi kepada direksi atas kinerja yang telah dilakukan, bukan karena keberuntungan semata Bertrand dan Mullinathan dalam Meilinda (2012). Dengan adanya pemberian kompensasi tersebut maka diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan juga kepada pengelola aset. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2012) yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak yaitu pembayaran pajak. Hasil ini menunjukkan arah yang sama dengan penelitian ini karena menurut Desai dan Dharmapala dalam Irawan (2012), buruknya kualitas *corporate governance* menyebabkan setiap peningkatan penyelarasan kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham menjadi alasan utama yang mendorong manajer mengurangi tingkat penghindaran pajak yang

menyebabkan pembayaran pajak menjadi lebih tinggi, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku pada perusahaan yang memiliki kualitas *corporate governance* yang baik.

Pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak

Hasil dari regresi menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,106 dengan probabilitas signifikansi adalah 0,271 berada lebih tinggi daripada $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas persediaan yang merupakan bagian dari investasi bukan merupakan cara yang tepat untuk melakukan manajemen pajak. intensitas persediaan tidak dapat memberikan dampak yang baik untuk perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan hal tersebut di dukung adanya *political cost theory* yang dikemukakan oleh Zimmerman dalam Richardson dan Lanis 2007 mengartikan bahwa ketika perusahaan mampu mencapai laba yang tinggi yang berarti nilai perusahaan baik maka menjadi sorotan dari pemerintah untuk mengambil keputusan seperti halnya mengenakan pajak atas perusahaan tersebut. Penelitian ini mendukung penelitian Soepriyanto dan Tanoto (2013) yang menunjukkan bahwa *inventory intensity* atau intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif yaitu perencanaan pajak ini berarti banyak sedikitnya intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan bukan merupakan faktor untuk menentukan besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Darmadi 2013 yang menyatakan bahwa intensitas persediaan menyebabkan bertambahnya pajak

yang dibayar, yang berarti intensitas persediaan tidak dapat dikaitkan untuk melakukan manajemen pajak karena perusahaan akan lebih memilih berinvestasi pada aset tetap yang mana ada beban penyusutan yang dapat dikurangkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian normalitas data menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.
2. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari gangguan multikolonieritas, heterokedasitas, dan autokorelasi.
3. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak.
4. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.
5. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak.
6. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel jumlah kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak.
7. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Keterbatasan

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini terbatas untuk jangka waktu tiga tahun, sehingga belum dapat melihat kecenderungan kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan berjangka panjang.
2. Penelitian ini hanya memilih sampel perusahaan yang mengungkapkan kompensasi dewan komisaris dan direksi.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan secara umum untuk perusahaan lain di Indonesia.
4. Variabel independen *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya pada dewan komisaris, persentase komisaris independen, komite audit dan kompensasi dewan komisaris dan direksi. Masih banyak komponen *corporate governance* lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk mengukur manajemen pajak selain CETR seperti *book tax differences*, *tax sheltering* dan lain-lain.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan komponen *corporate governance* yang lebih luas, seperti kepemilikan institusional, kualitas audit, kepemilikan manajerial, *corporate social responsibility* dan komponen *corporate governance* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ardyansah, Danis dan Zulaikha. 2014. *Pengaruh size, leverage, profitability, capital intensity ratio* dan komisaris independen terhadap *effective tax rate*. *Journal of accounting* diponegoro, Vol 3 No 2 tahun 2014, Halaman 1-9, ISSN (online): 2337-3806

Chen,S., Chen,X, dll. 2010. *Are family firms more tax aggressive than non-family firms?**Journal of financial economics*. 95, 46-61.

Darmadi, Iqbal Nul Hakim dan Zulaikha. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemn Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Jurnal* volume 2, Nomor 4 Tahun 2013.

Dewi, Ni Nyoman Kristina dan Jati I Ketut. 2014. Pengaruh karakteristik eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada *tax*

Saran

1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan rentang waktu yang lebih lama untuk menghindari terjadinya bias pada hasil penelitian.
2. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan menggunakan sampel yang tidak terbatas pada perusahaan manufaktur saja.

- avoidance* di bursa efek Indonesia. *E-jurnal akuntansi Universitas Udayana*.
- Irawan, Hendra dan Aria Farahmita. 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* terhadap Manajemn Pajak Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Jensen, Michael dan William H.meckling. 1997. Theory of the firm: Managetial Behavior, agency costc and ownership structure. *Journal of Financial Economics*
- Meilinda, Maria dan Nur Cahyonowati. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Volume 2, No.3 Tahun 2013*, ISSN (online) : 2337:3806.
- Minnick, Kristina dan Tracy Noga. 2010. *Do Corporate Governance Influence Tax Management?*. *Journal Of Corporate Finance*, 16, 703-718.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Richadson, Grant and Lanis Roman. 2007. *Determinants of the variability in CETR and tax reform : evidence from Australia*. *Journal of accounting and public policy Vol.26*.
- Sabli, Nurshamimi dan Noor Md Rohaya. 2012. "*Tax Planning and Corporate Governance*". *Proceeding International Conference on Business and Economic Reserch*. Bandung.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soepriyanto, Gatot dan Tiffany Tanoto. 2013. Analisis dampak reformasi perpajakan PPh badan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan Go Publik di Indonesia. *Jurnal Universitas Binus*.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.14 Tahun edisi revisi 2008.
- BAPEPAM. Kep-29/PM/2004 Nomor IX.1.5 mengenai pembentukan dan pelaksanaan komite audit.